

Judul : Tes Kemampuan Akademik Siswa SMA Bisa Jadi Alat Ukur Kualitas Pendidikan
Tanggal : Rabu, 05 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tes Kemampuan Akademik Siswa SMA

Bisa Jadi Alat Ukur Kualitas Pendidikan

WAKIL Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mendukung pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan sederajat di seluruh Indonesia.

Hal ini merupakan langkah penting dalam upaya mengukur hasil proses pembelajaran dan tingkat pemerataan mutu pendidikan di setiap daerah. "Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih objektif mengenai kualitas pendidikan di tanah air. Apakah sudah merata atau masih terjadi ketimpangan," ujar Lalu Hadrian, kemarin.

Diketahui, TKA siswa jenjang SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah seluruh Indonesia digelar mulai Senin (3/11/2025). Sebanyak 3.518.167 siswa kelas XII dari 43.918 satuan pendidikan mengikuti tes pengganti Ujian Nasional (UN) tersebut. Tercatat siswa SMA menjadi yang terbanyak dengan 1,75 juta peserta, disusul SMK 1,59 juta, dan Madrasah Aliyah sekitar 506 ribu peserta.

Lalu Hadrian memberikan sejumlah catatan penting agar kebijakan pelaksanaan TKA berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Pasalnya, aturan saat ini masih menyatakan TKA tidak bersifat wajib, tapi hasilnya justru menjadi syarat wajib dalam proses seleksi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi

(SNBP). "Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan bagi sekolah maupun peserta didik," kata politikus PKB ini.

Jika hasil dijadikan syarat wajib untuk mengikuti SNBP, seharusnya pelaksanaan TKA juga diwajibkan bagi seluruh siswa. Tujuannya agar ada keadilan dan kepastian. "Kita perlu memastikan TKA tidak menjadi satu-satunya alat ukur capaian akademik, tapi dilihat sebagai salah satu komponen penilaian yang melengkapi asesmen lainnya," jelas Lalu Hadrian.

Selain itu, ia mendorong agar Kementerian Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Kemendikristek) berkoordinasi secara intensif dengan Forum Rektor maupun panitia nasional SNBP. Tujuannya, untuk menyamakan persepsi dan memastikan sinkronisasi kebijakan antara pelaksanaan TKA dan seleksi masuk perguruan tinggi.

"Konsistensi kebijakan antar lembaga menjadi kunci agar sistem seleksi nasional berjalan transparan, adil, dan terukur," tandas legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.

Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi publik yang menyeluruh dan berjenjang kepada masyarakat. Utamanya kepada orang tua siswa, mengenai tujuan, mekanisme pelaksanaan, dan implikasi hasil TKA terhadap proses seleksi ke jenjang pendidikan tinggi.

Pemerintah harus memastikan



Lalu Hadrian Irfani

masyarakat memahami dengan jelas apa itu TKA, apa manfaatnya, dan bagaimana hasilnya digunakan. "Jangan sampai terjadi kesalahpahaman atau kebingungan yang justru menimbulkan keresahan," tandasnya.

Dia bilang, pelaksanaan TKA yang disertai dengan regulasi yang kuat, koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, dan sosialisasi yang efektif kepada publik akan menjadikan kebijakan ini lebih kredibel dan diterima secara luas.

Komisi X DPR kata Lalu Hadrian, akan terus mengawal implementasi TKA agar benar-benar berfungsi sebagai alat ukur objektif dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. "Bukan sekadar menjadi formalitas atau beban tambahan bagi peserta didik," imbuhnya.

Melalui pelaksanaan TKA yang

transparan, adil, dan konsisten, ia berharap hasilnya dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Juga menjadi pijakan penting dalam upaya membangun sistem pendidikan yang merata, berkualitas, dan berdaya saing di seluruh wilayah Indonesia.

Berbeda, anggota Komisi X DPR Andi Muawiyah Ramly meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) segera mengevaluasi pelaksanaan TKA. Sebab banyak siswa SMA sederajat yang enggan mengikuti TKA. "Fenomena ini harus menjadi catatan serius bagi Kemendikdasmen," kata Amure sapaan akrabnya, Senin (3/11/2025).

Diketahui, dari total 4,17 juta siswa kelas 12, sebanyak 3.518.166 siswa mengikuti TKA. Artinya ada 691 ribu siswa yang tidak mengikuti TKA.

Amure menilai ini sinyal penting ada masalah dalam sistemnya. Baik dari sisi teknis, psikologis, maupun akses. Sehingga Pemerintah perlu turun tangan memastikan pelaksanaan TKA tidak justru menutup kesempatan siswa melanjutkan pendidikan.

"Jadi evaluasi TKA harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari desain ujian, pemerataan fasilitas, hingga beban psikologis peserta didik," saran politikus PKB ini.

Dia meminta Kemendikdas-

men memperbaiki skema TKA dengan pendekatan yang lebih inklusif. Caranya, melalui kombinasi penilaian rapor, portofolio, hasil tes, dan membuka kesempatan remedi atau jalur afirmasi bagi siswa yang hasil TKA-nya belum memenuhi standar.

"Prinsipnya, setiap lulusan SMA atau sederajat tetap harus memiliki hak untuk mengikuti seleksi perguruan tinggi, tanpa terkunci oleh satu hasil ujian semata," tegas Amure.

Di berbagai negara maju, sistem tes pendidikan umumnya tidak dijadikan penentu tunggal kelulusan atau akses ke perguruan tinggi. Seperti di Finlandia, lebih menekankan pada penilaian guru dan proyek belajar. Di Amerika Serikat kini banyak menerapkan kebijakan *test-optional*, di mana hasil tes bukan satu-satunya syarat masuk universitas. "Di Jepang dan Korea Selatan, sistem ujian nasional memang masih digunakan," ucap Amure.

Selain itu, Amure menegaskan pentingnya transformasi sistem pendidikan nasional agar tidak hanya berorientasi pada nilai, tetapi pada kualitas dan pemerataan. Sehingga semua pihak harus memastikan pendidikan membentuk kompetensi dan karakter, bukan sekadar kemampuan mengerjakan soal. "Tes hanyalah alat ukur, bukan tujuan akhir," tandasnya. ■ TIF